



**LAPORAN HASIL ENTRY MEETING
PELAKSANAAN EVALUASI REFORMASI
BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA 2016
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Dengan
Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB
18 Juli 2016**



Tim Evaluator dan Dasar Evaluasi

Entry Meeting Pelaksanaan Evaluasi RB dan Akuntabilitas Kinerja berdasarkan Surat No. B/2384/D.I PAN RB/06/2016 telah dilaksanakan pada 18 Juli 2016



Teguh Widjinarko



Ananda Juarsa



Agus Taruno



Sri Widiastuti



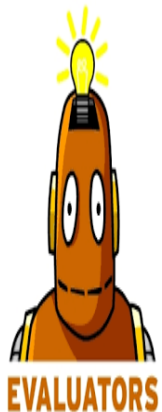
Firmansyah



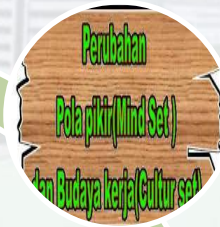
Anesia Ribka



Juni Fairnando



PP 81/2010 ttg Grand Design RB 2010-2025; PPerMenPAN RB 11/2015 ttg Road Map Map RB 2015-2019 dan 14/2014 ttg Pedoman Evaluasi RB; PP 8/2006 ttg Pelaporan dan Kinerja; PerPres 29/2014 ttg SAKIP; PerMenPAN RB 12/2015 ttg Pedoman Evaluasi Implementasi SAKIP



Memberikan akses data dan informasi kepada Tim Evaluator KemenPAN RB



Menkoordinasikan dan membantu pelaksanaan evaluasi dalam mengumpulkan dan menyampaikan data yang dibutuhkan Tim Evaluator KemenPAN RB



Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi agar tercapai perbaikan :
- Pelaksanaan RB secara berkelanjutan
- Perbaikan Penerapan Manajemen Kinerja yang berkelanjutan



Tujuan Evaluasi

Memetakan
perkembangan/kemajuan
pelaksanaan reformasi
birokrasi, dan Akuntabilitas
kinerja

Memberikan saran dalam
rangka perbaikan dan
percepatan pelaksanaan
reformasi birokrasi dan
akuntabilitas kinerja



Pemerintah yg bersih,
akuntabel & berkinerja
tinggi

1



Pemerintahan yg efektif
dan efisien

2



Pelayanan publik yg baik
dan berkualitas

3



Komponen Yang Dinilai		2014		2015	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	35	21,51	30	19.43
b.	Pengukuran Kinerja	20	11,30	25	11.43
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,96	15	9.97
d.	Evaluasi Internal	10	4,88	10	4.79
e.	Capaian Kinerja	20	13,50	20	12.74
Nilai Hasil Evaluasi		100	61,15	100	58,36
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC		CC



Tindak Lanjut AKIP

Simpulan Sementara

- ❑ Adanya ketidakselarasan antara Indikator Kinerja Utama dengan upaya pencapaian target-targetnya melalui berbagai kegiatan operasionalisasi.
- ❑ Perlu menyusun rencana aksi dan melakukan pemantauan terhadap kemajuannya
- ❑ Indikator kinerja utama belum berorientasi *outcome* yang terukur, sehingga tidak saja memberikan kejelasan tentang hasil dari kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi tetapi juga menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyelaraskan upaya-upaya pencapaian target organisasi
- ❑ Kualitas laporan kinerja belum sepenuhnya memadai dikarenakan analisis capaian belum menggambarkan keberhasilan entitas, selain itu belum ada pembandingan data dengan tahun sebelumnya
- ❑ Renstra, RKT, PK, IKU dan LKj setjen DPR belum dimuat dalam website resmi

Tindak Lanjut

- Keputusan Rapat Rabu 27 Januari 2016

Keterangan

- Lihat Lampiran

(Rencana Aksi Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Setjen dan BKD 2016)





Indek RB

No	Komponen Penilaian	Nilai Maks	Nilai 2014	Nilai 2015	% Capaian
A	Pengungkit				
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,08	3,92	78,30
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	1,88	2,29	45,75
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,82	3,84	64,06
4	Penataan Tatalaksana	5,00	3,34	3,60	71,90
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	5,07	11,65	77,69
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,65	3,33	55,53
7	Penguatan Pengawasan	12,00	5,12	6,18	51,52
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	2,96	2,96	49,36
Sub Total Komponen Pengungkit		60,00	26,92	37,77	62,95
B	Hasil				
1	Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	8,56	12,40	69,57
2	Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN	10,00	3,00	8,07	55,00
3	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	0,00	7,75	80,00
Sub Total Komponen Hasil		40,00	11,56	28,22	68,53
Indeks Reformasi Birokrasi		100,00	38,48	65,99	65,99



Tindak Lanjut RB

Simpulan Sementara

- ❑ Menjadikan road map RB yang telah disusun sebagai guidance dalam perkembangan RB di Setjen DPR
- ❑ Belum menyusun laporan perkembangan RB sebagai sarana memantau dan mengevaluasi kemajuan RB
- ❑ Belum dilakukan pemantauan perkembangan rencana aksi dan quickwins yang telah ditetapkan oleh Setjen DPR
- ❑ Perlunya Setjen DPR melakukan perbaikan terus menerus pada area-area yang lainnya untuk semakin lebih baik lagi.

Tindak Lanjut

Keterangan



Yang perlu dipersiapkan

Evaluasi AKIP

1. Renstra
2. IKU
3. PK
4. Laporan Kinerja
5. Sample minimal 4 unit kerja



1. Inspektorat
2. Biro Perencanaan dan Keuangan
3. Unit Kerja yl (Birosid/Yankes/Perpustakaan)
4. Unit kerja baru

Evaluasi Reformasi Birokrasi

1. Seluruh bukti dukung yang telah tercompile
2. Perwakilan pejabat/pegawai dari tiap area perubahan untuk diskusi
3. Minimal 100 pegawai untuk survey kapasitas organisasi



Proporsional Unit Kerja dan Jabatan

Seluruh bukti dukung baik AKIP dan RB diharapkan dalam bentuk Softcopy



Terima Kasih

Ittama.dpr.go.id
Juli 2016